



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Rapat Ke         | : 4  |
| Tahun Sidang     | : 2017-2018  |
| Masa Persidangan | : II   |
| Jenis Rapat/ke-  | : Rapat Dengar Pendapat / <b>Ke-1</b>  |
| Dengan           | : <b>Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH</b>   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari, Tanggal    | : <b>Selasa, 21 November 2017</b>  |
| Waktu            | : Pukul 10.00 WIB  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI   |
| Ketua Rapat      | : <b>Dr. H. NOOR ACHMAD, M.A</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Yanto Supriyanto, S.H  |
| Acara            | : Membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  |
| Hadir            | : 1. .... orang dari 49 orang Anggota Panja<br>2. Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH |

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.54 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Noor Achmad, MA.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas “**Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk menyampaikan data lebih rinci mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.335.000.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah*) yang dapat dievaluasi untuk dilakukan perubahan setelah dilakukan review oleh Dewan Pengawas kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan paling lambat minggu kedua bulan Desember 2017.
2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan uang muka untuk Program Kerja BPKH selama Januari-Maret Tahun 2018 senilai Rp.60.200.000.000,- (*enam puluh miliar dua ratus juta rupiah*) dengan catatan detail biaya per kegiatan dilakukan supervisi dan persetujuan oleh Dewan Pengawas BPKH.
3. Untuk meningkatkan output dari rencana kerja dan anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk:
  - a. Melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan dan kebijakan BPKH kepada masyarakat.
  - b. Menyampaikan laporan penggunaan anggaran tahun 2017.
  - c. Menyampaikan portofolio investasi untuk dibahas bersama.
  - d. Menyampaikan hasil kajian-kajian dari berbagai kebijakan BPKH kepada Komisi VIII DPR RI.
  - e. Menyampaikan seluruh peraturan yang telah disusun BPKH.
  - f. Menyusun usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk memudahkan pembahasan antara Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja terkait.

4. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat dengan Menteri Agama RI dan BPKH untuk membahas penyelesaian peralihan keuangan haji dan hal-hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat secara khusus dengan Dewan Pengawas BPKH untuk membahas mengenai program kerja, anggaran, dan prosedur dalam pengawasan terhadap Badan Pelaksana BPKH.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.06 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**ttd**

**Dr. H. NOOR ACHMAD, MA**